

Pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh Muhammadiyah dalam rangka menyiapkan civil society

Syifa Alkautsar¹, Suharno²,

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

ABSTRAK

Pendidikan politik bagi pemilih pemula penting diselenggarakan terutama pada negara yang sedang mengalami demokratisasi seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pendidikan politik bagi Pemilih Pemula oleh Muhammadiyah dalam rangka menyiapkan *civil society*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Yogyakarta. Data dalam penelitian ini diambil dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diuji dengan teknik *crosscheck*, yaitu dengan pengecekan hasil wawancara antar narasumber dan kesesuaian dengan dokumentasi yang diperoleh. Analisis data menggunakan teknik model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh Muhammadiyah dalam rangka menyiapkan *civil society* dilakukan melalui dua saluran, yaitu pendidikan politik melalui institusi pendidikan dan pendidikan politik di luar institusi pendidikan melalui organisasi otonom kepemudanan dan keputrian. Pendidikan politik dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berupa seminar, diskusi terbuka, pelatihan, dan kampanye-kampanye di kalangan internal kader organisasi.

ABSTRACT

Political education for beginner voters is important, especially in a country that is undergoing democratization such as Indonesia. This study aims to describe the implementation of political education for beginner voters by Muhammadiyah in order to prepare civil society. This study uses a qualitative method with a descriptive type of research conducted at the Central Executive Board of Muhammadiyah, Yogyakarta. The data in this study were taken by means of interviews and documentation. The data obtained were tested with a crosscheck technique, namely by checking the results of interviews between sources and conformity with the documentation obtained. Data analysis used the Miles and Huberman model technique, including data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results showed that the implementation of political education for beginner voters by Muhammadiyah in order to prepare civil society was carried out through two channels, namely political education through educational institutions and political education outside educational institutions through youth and girlhood autonomous organizations. Political education is carried out by organizing activities in the form of seminars, open discussions, training, and campaigns among the internal cadres of the organization.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui:

Kata kunci:

Pendidikan politik, pemilih pemula, civil society, Muhammadiyah

Keywords:

Political education, beginner voters, civil society, Muhammadiyah

Pendahuluan

Civil society adalah kelompok sosial yang dapat melindungi warga negara dari dominasi kekuasaan negara, karena *civil society* merupakan tiang utama terciptanya kehidupan politik yang demokratis. *Civil society* merupakan kelompok masyarakat yang mandiri memiliki independensi untuk melakukan kritik kepada pemerintah dan korporasi swasta. Kritik kepada pemerintah tersebut dapat menumbuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis. Gaffar dalam Halili (2006: 93) menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia proses demokratisasi masih terus berjalan, artinya *civil society* merupakan sebuah cita-cita politik, walaupun pada perjalanannya sampai saat ini pencapaian tujuan tersebut bukan sesuatu yang mudah. Sosialisasi politik di Indonesia masih

melahirkan pendidikan politik yang belum memberikan *space* yang cukup untuk berkembangnya *civil society*. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan politik di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik.

Berbicara mengenai *civil society* atau masyarakat madani tidak dapat jauh dari pembahasan kekuatan pembentuknya salah satunya organisasi masyarakat (ormas). Fakta yang terjadi saat ini ormas yang seharusnya menjadi jembatan bagi kepentingan umum, seringkali dibiarkan menjadi representasi dari kepentingan beberapa kelompok kekuasaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga *genuine organization* (ormas sesungguhnya). Hal ini terjadi karena kurangnya ormas dalam segi anggaran, rendahnya sumber daya manusia, lemahnya aspek manajerial serta prasarana. Atau pada beberapa kasus terjadi perubahan haluan dari organisasi kontrol menjadi organisasi pendukung (*pocket organization*), yang terjadi karena organisasi tidak dapat memenuhi kebutuhan sumber daya organisasi, sehingga alih-alih menjadi alat kontrol, organisasi ini justru bekerja sama dan mengambil manfaat dari kekuasaan-kekuasaan tertentu (Prayoga, 2017: 7-8). Namun, tentu tidak semua organisasi masyarakat di Indonesia lemah.

Salah satu organisasi masyarakat yang senantiasa konsisten berkontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi dakwah yang memiliki beberapa amal usaha di bidang dakwah, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Muhammadiyah melalui amal usahanya di bidang pendidikan ikut serta dalam usaha mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, salah satu usaha Muhammadiyah yang lain adalah Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, maka termasuk dalam usaha Muhammadiyah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Kuswandro (2016: 1) memaparkan pendapat Dahl bahwa pendidikan politik menjadi semacam penyiapan masyarakat untuk lebih siap berpengalaman melakukan aktivitas politik. Semakin berpengalaman melakukan aktivitas politik, berarti masyarakat semakin dewasa (*learning society*) dalam berpolitik dan berdemokrasi. Menurut Surbakti, pendidikan politik merupakan proses mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik masyarakat dan negaranya atau proses memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat (Halking, 2016: 201). Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien (Hermawan, 2020: 6). Kemampuan dalam mengumpulkan informasi, pengetahuan tentang struktur politik, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga pemerintahan akan diperoleh dalam pendidikan politik. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan politik sangatlah penting untuk menumbuhkan melek politik bagi masyarakat.

Pendidikan politik di Indonesia dilaksanakan oleh para penjaga demokrasi seperti partai politik, *civil society* dan media massa. Namun, pada umumnya dilakukan oleh partai politik yang merupakan salah satu instrumen paling penting dalam sebuah negara demokrasi, dan hidupnya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya partai politik. Salah satu fungsinya adalah bertanggungjawab atas pendidikan politik bagi kadernya maupun masyarakat luas (Saputro, 2015: 35). Tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kematangan, dan membangun jiwa nasional untuk menjaga persatuan nasional. Pendidikan politik

dilakukan untuk membangun budaya etis dan politik yang sesuai dengan Pancasila (Kusuma, 2020: 166).

Namun pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik masih sebatas usaha pemenangan elektoral, perebutan suara rakyat untuk memenangkan pilihan. Partai politik lebih memilih mobilisasi suara rakyat untuk memenangkan pemilihan elektoral karena terkendala biaya dan waktu. Sebagai contoh, dalam rekrutmen caleg/kandidat kepala daerah atau pemimpin partai, partai lebih cenderung memilih calon yang lebih siap secara modal, baik itu modal sosial (*public figures, vote-getter figures*, penguasa basis suara/ massa) maupun modal finansial. Hal tersebut adalah dorongan hasrat pragmatis untuk mencapai intensif politik (Kuswandoro, 2016: 2-3). Mahar politik yang tinggi pun menjadi salah satu penyebab partai politik lebih memilih kader yang siap secara finansial.

Berangkat dari pembiasan tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik, maka perlu adanya sarana atau agen lain yang mampu menyelenggarakan pendidikan politik sesuai tujuannya. Sarana pendidikan politik di Indonesia selain melalui partai politik, dapat pula melalui organisasi masyarakat. Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang mandiri dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik atau partai politik manapun merupakan indikator bahwa Muhammadiyah dapat menyelenggarakan pendidikan politik. Artinya Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi otonom dapat menyelenggarakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai politik. Pendidikan politik oleh Muhammadiyah penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik khususnya pemilih pemula yang berada di lingkungan Muhammadiyah. Banyaknya institusi pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah membuatnya berkaitan erat dengan pemilih pemula, yaitu pemilih yang baru akan pertama kali menggunakan hak pilihnya. Rentang usia pemilih pemula dilihat berdasarkan siklus pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali adalah 17-21 tahun. Rentang usia tersebut berada di usia pelajar, mahasiswa, pemuda dan pemudi.

Pemilih pemula merupakan kelompok pemilih dengan jumlah yang cukup besar. Apabila dengan jumlah pemilih pemula yang besar tersebut dapat disalurkan dengan baik dan benar maka akan menambah legitimasi calon legislatif maupun calon eksekutif yang terpilih. Adanya dukungan dari pemilih milenial yang memilih secara rasional, maka legitimasi pemerintahan dari hasil pemilu 2019 akan menjadi lebih baik dan kuat (Harnom, 2019: 3-4). Pemilih pemula sebenarnya sama dengan pemilih lain yang memiliki hak yang sama dalam hal menyalurkan suaranya dalam pemilu. Pemilih pemula juga harus bertanggung jawab dan bersikap bijaksana dengan suara yang telah di salurkan melalui pemilu. Namun, pada kenyataannya seringkali pemilih pemula belum mengerti akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilu. Sebagai golongan yang mempunyai persentase besar, pemilih pemula memiliki sederet resiko, seperti politik uang, golongan putih (goput), dan kampanye hitam.

Risiko tersebut diakibatkan kurangnya minat generasi milenial pada permasalahan politik. Penyebab selain kurangnya ketertarikan terhadap politik juga dikarenakan tingkat pendidikan, kurangnya informasi terkait pencoblosan, dan lingkungan tempat tinggal. Hal ini merefleksikan bahwa politik di negara kita belum mampu memberikan pembelajaran berdemokrasi yang substansial. Dengan demikian, maka pendidikan politik perlu diselenggarakan terlebih pada usia pemilih pemula agar dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggungjawab. Usaha penyelenggaraan pendidikan politik ini dapat dilakukan oleh sekolah, media massa/pers, partai politik, keluarga maupun organisasi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Eneng Martini, dkk., dengan judul Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula di SMK PGRI 1 Cimahi Jawa Barat, hasil penelitiannya menyatakan bahwa sebesar 79,46% responden menyatakan setuju dengan pendidikan politik yang diajarkan melalui mata pelajaran PPKn di SMK PGRI 1 Cimahi. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi pemilih pemula di SMK PGRI 1 Cimahi

mencapai 71,38%. Selain itu, pengaruh yang diberikan pendidikan politik terhadap partisipasi pemilih pemula di SMA PGRI 1 Cimahi mencapai 29,1%. Meskipun bukan angka yang besar namun, menurut Martini, persentase tersebut telah menggambarkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendidikan politik terhadap partisipasi pemilih pemula di SMK PGRI 1 Cimahi.

Selain melalui sekolah, pendidikan politik juga dilakukan oleh partai politik. Namun seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa orientasi partai politik di Indonesia saat ini hanya sebatas mobilisasi suara untuk kemenangan elektoral. Maka perlu terdapat organisasi yang tidak mengaitkan dirinya terhadap politik praktis, tidak berupaya untuk merebut kekuasaan, dan bersikap netral serta mandiri secara finansial menyelenggaraan pendidikan politik yang mencerdaskan bagi rakyat. Muhammadiyah dalam hal politik mengambil sikap aktif tetapi tidak berupaya untuk ikut memperebutkan kekuasaan (politik praktis), namun mengambil sikap netral dan melakukan perjuangan melalui politik moral (*high politics*). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh Muhammadiyah dalam rangka membentuk *civil society*. Topik pendidikan politik oleh organisasi masyarakat sebagai elemen *civil society* juga menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Eneng Martini, dkk.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin memperoleh data secara narasi deskriptif pada suatu lembaga atau organisasi masyarakat, yaitu tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula sebagai upaya pembentukan *civil society* yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Teknik pengambilan responden dilakukan dengan model pengambilan sampel secara *purposive* ini ada kecenderungan peneliti memilih narasumber yang mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap. Narasumber penelitian ini meliputi: Anggota Bidang Publikasi dan Kerjasama Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, Ketua Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiah, Ketua Bidang Advokasi IPM DIY.

Peneliti menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik *crosscheck*. *crosscheck* adalah upaya mendapatkan data yang valid dengan cara menanyakan kepada informan pertama dan kedua dengan pertanyaan yang sama, apabila jawaban yang didapat selaras, maka data yang diperoleh valid dan sebaliknya (Nugrahani, 2014: 114). Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman, meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil dan Pembahasan

Politik di Muhammadiyah dimaknai dengan *high politics* yang berarti bahwa Muhammadiyah tidak terjun langsung dalam masalah politik praktis namun masih tetap menjadi penyeimbang kekuatan negara. Dengan kata lain, Muhammadiyah dalam bidang politik kenegaraan senantiasa berada pada jalur kemasyarakatan yang menurutnya tidak kalah strategis dengan jalur politik praktis. *High politics* ini merupakan faham politik kebangsaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Faham kebangsaan Muhammadiyah adalah aktif memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia, aktif menjaga keutuhan dan membangun NKRI dengan semangat syukur agar mendapat Ridha Allah, sehingga menjadi "suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun" sesuai Al Quran Surat Saba' ayat 15 (Hazmi, 2020: 3). Selain itu,

Muhammadiyah juga mempertegas bahwa dirinya bukan merupakan organisasi politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

Pendidikan politik di Muhammadiyah diartikan sebagai pembinaan dan pemahaman bagi anggota maupun masyarakat luas tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara untuk selanjutnya menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap negaranya. Pendidikan politik bagi pemilih atau *Voter Education* di Muhammadiyah diwujudkan dalam beberapa kegiatan seminar, diskusi terbuka, dan talkshow. Di era digital seperti saat ini agenda seperti membuat media-media kampanye, sosialisasi tata cara pemilihan, kampanye untuk pemilu yang ramah dengan difabel juga dapat disalurkan dalam bentuk media-media online, yaitu sosial media hingga podcast yang saat ini menjadi saluran informasi yang digemari millennial. Khittah Denpasar 2002 menyatakan bahwa pendidikan politik dilakukan melalui kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara. Muhammadiyah melakukan pendidikan politik yang bersifat kemasyarakatan dan menghindari keterlibatan organisasi dalam hal politik praktis karena menjauhkan diri dari konflik kepentingan yang akan membiaskan semangat dakwahnya.

Muhammadiyah dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat salah satunya dengan cara melakukan diskusi-diskusi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang sedang dirancang atau telah dibuat oleh Pemerintah atau yang dikenal dengan Jihad Konstitusi pada masa kepemimpinan Din Syamsuddin. Saat ini Jihad Konstitusi tidak lagi menjadi isu utama yang ditangani Muhammadiyah, namun bukan berarti Muhammadiyah berhenti mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya kritik terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang tetap dilaksanakan pada masa Pandemi *Covid-19*. Pernyataan Muhammadiyah dalam menanggapi Pilkada Serentak tahun 2020 tersebut dinyatakan melalui Pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 20/PER/I.O/H/2020 Tentang Penanganan Pandemi *Covid-19*. Pernyataan pers tersebut juga membahas tentang permohonan Muhammadiyah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia agar menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU *Omnibus Law* atau Cipta Kerja. Namun terlepas dari kritik-kritik yang disampaikan tersebut, Muhammadiyah selalu menghormati keputusan akhir pemerintah. Hal ini terbukti pada saat penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap terlaksana, Muhammadiyah tidak mengambil sikap apatis terhadap Pilkada 2020. Muhammadiyah sendiri membebaskan para anggotanya menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing.

Muhammadiyah merupakan salah satu elemen *civil society* di Indonesia. *Civil society* menurut Larry Diamond digambarkan sebagai masyarakat yang terorganisir dan sukarela, mandiri atau otonom dari negara, dan terikat oleh aturan hukum bersama. Kemandirian *civil society* inilah yang membuat tindakannya bebas dari pengaruh manapun, termasuk dalam hal ini Muhammadiyah. Melalui AUM di berbagai bidang, membuat Muhammadiyah tidak bergantung pada kekuasaan negara semata, namun justru menjadi kekuatan pembantu negara, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Institusi pendidikan yang dibangun Muhammadiyah di berbagai wilayah di Indonesia memberikan kontribusi besar dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Sejauh ini Muhammadiyah konsisten dalam hal membangun bangsa dan negara melalui kegiatan kemasyarakatan, bahkan kegiatan kemanusiaan Muhammadiyah telah melampaui batas negara Indonesia.

Khittah Perjuangan Denpasar tahun 2002 menyatakan bahwa perjuangan Muhammadiyah di bidang kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*) sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Sedangkan dalam mewujudkan masyarakat Islam tersebut dilakukan melalui dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai

dengan amanat Ali Imron ayat 104 dan 110. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *civil society* atau masyarakat madani yang ingin dicapai Muhammadiyah adalah masyarakat utama atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yaitu sebagai pelaku dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Haedar Nashir dalam bukunya Muhammadiyah Abad Kedua (2016: 157) menjelaskan bahwa Muhammadiyah berjuang dalam koridor kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilasafat Pancasila, untuk berusaha bersama-sama menjadikan negara yang adil makmur dan diridhai Allah SWT.

Negara Demokrasi tak luput dari pemilihan umum (pemilu) dan memilih pemula sebagai pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Sehingga pendidikan politik bagi pemilih pemula patut diselenggarakan pada negara demokrasi seperti Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula memiliki tujuan untuk membangun kesadaran pemilih pemula untuk terlibat dalam proses politik, salah satunya dengan berpartisipasi aktif dalam pemilu. Pendidikan politik bagi pemilih pemula juga memberikan informasi kepada mereka tata cara memilih dan menggunakan hak pilihnya. Setelah kesadaran untuk berpartisipasi politik sudah tumbuh, maka diharapkan selanjutnya pemilih pemula dapat mempunyai kemandirian untuk menentukan hak pilihnya berdasarkan informasi yang cukup, sehingga dapat memanfaatkan hak pilihnya dengan baik, benar dan tepat. Pemahaman pengetahuan tentang pemilu akan menghindarkan pemilih pemula dari berita *hoax*, politik uang dan hal-hal yang berkaitan dengan *black campaign*, sehingga tercipta demokrasi yang baik dan sehat. Cita-cita yang lebih jauh lagi bahwa para pemilih pemula tersebut di masa mendatang dapat menjadi penyalur aspirasi politik warga dengan menjadi kader-kader unggulan yang terjun ke pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kebajikan bagi rakyat.

Usaha Muhammadiyah dalam melaksanakan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan politik diwujudkan melalui penyelenggaraan program-program oleh organisasi otonom, amal usaha Muhammadiyah (AUM), majelis-majelis dan lembaga-lembaga di Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah telah menyatakan bahwa perjuangan politik dilakukan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat. Pada pendidikan politik bagi pemilih pemula, posisi strategis dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih pemula berada pada AUM di bidang pendidikan dan ortom yang anggotanya merupakan pelajar dan/atau pemuda-pemudi.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tentu memiliki peran terpenting dalam penyampaian pendidikan politik di sekolah bahkan dari sejak sekolah dasar (SD), termasuk sekolah/madrasah Muhammadiyah. Penguatan nilai-nilai *high politics* melalui PPKn, Kemuhammadiyahan, dan Al-Islam di sekolah menjadi salah satu wujud komitmen Muhammadiyah dalam usaha mengenalkan gagasan Muhammadiyah tentang negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*. Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* telah secara tegas disusun dan dibahas dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun 2015.

Dikdik Baehaqi Arif (2018) dalam pidatonya pada Sosialisasi Empat Pilar MPR di Universitas Ahmad Dahlan menuturkan, *Darul Ahdi* menurut Din Syamsuddin adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan di antara seluruh rakyat warga negara. Abdul Mu'ti menyebut, Muhammadiyah menegaskan bahwa adanya negara Pancasila itu merupakan satu produk dari kesepakatan atau satu kompromi dari para tokoh pendiri bangsa. Kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri bangsa dalam hubungannya dengan bentuk negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konsep *darus syahadah* (negara persaksian) lahir dari pemikiran bahwa umat islam bertanggung jawab dengan argumen-argumen termasuk teologis yaitu tentang "kesaksian", terutama sebagai ummatan wasathan (umat tengahan). Konsep negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* memberikan tafsir baru atas NKRI yang didirikan di atas perjanjian seluruh komponen bangsa, dan memberikan penegasan pentingnya pembuktian perjanjian itu dalam kehidupan

membangun bangsa dan negara. Oleh sebab itu, Muhammadiyah melalui segala amal usahanya berusaha menegakkan konsep negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*.

Selain melalui pembelajaran PPKn, sekolah Muhammadiyah melakukan pendidikan politik bagi para siswanya melalui organisasi otonom yang berada di lingkungan sekolah, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Berdasarkan struktur organisasi Muhammadiyah, maka IPM yang berada di sekolah merupakan pimpinan ranting yang secara koordinatif berada di bawah pimpinan cabang atau pimpinan daerah setempat. Garis koordinasi tersebut berlanjut hingga pimpinan wilayah daerah setempat dan pusatnya berada pada Pimpinan Pusat IPM. Sedangkan pada perguruan tinggi terdapat ortom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang menangani pendidikan politik di kalangan mahasiswa. Sama halnya dengan IPM, garis koordinasi IMM juga dimulai dari pimpinan ranting yang berada di masing-masing perguruan tinggi di seluruh Indonesia hingga Pimpinan Pusat IMM.

IPM menjadi ortom yang mengawal pelajar di sekolah dalam hal pendidikan politik. Meskipun ranah yang dipegang oleh IPM adalah ranah literasi, namun, pada tahun 2019 IPM mulai memberanikan diri untuk tampil di muka dengan berbagai program pendidikan politik, seperti yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. PW IPM DIY menyelenggarakan Sekolah Advokasi untuk Pelajar DIY yang bertujuan untuk mencetak Pelajar yang paham dan menjadi subjek dari politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) di DIY. Gagasan tersebut muncul akibat keresahan IPM terhadap para pelajar sebagai pemilih pemula yang seringkali menjadi sasaran objek dari agenda polhukam. Langkah tersebut merupakan wujud sikap kritis para Pelajar Muhammadiyah yang resah dengan nasib kalangan pelajar sebagai pemilih pemula yang mayoritas minim pengetahuan tentang politik.

Sejalan dengan semangat kebangsaan Muhammadiyah yang berkontribusi lewat politik moral, IPM selaku ortom di kalangan pelajar juga melakukan pengawalan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. *High politics* lainnya yang dilakukan IPM adalah ikut serta dalam penyusunan draft tuntutan terhadap rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law, RKUHP, KPK dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan juga untuk mengedukasi para pelajar tentang manajemen aksi yang masih minim diberikan di lingkungan sekolah. Aksi tersebut merupakan salah satu realisasi dari pendidikan politik yang dilakukan oleh IPM, terutama prinsip *high politics*. Mulai dari persiapan aksi, konsolidasi yang melahirkan daftar tuntutan-tuntutan yang akan dibawa ke aksi, hingga pelaksanaan aksi adalah bukti bahwa pelajar juga memiliki andil dalam menjaga negaranya tetap pada poros yang benar.

Pelaksanaan aksi ini dijadikan sebagai bukti bahwa pelajar juga bagian dari masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya dan mewakili masyarakat lain yang tidak mampu dan tidak bisa menyuarakan haknya. Aksi ini juga merupakan wujud dari pendampingan rakyat terhadap entitas negara untuk tidak menggunakan kekuatannya yang tak terbatas dengan sewenang-wenang. Melalui aksi tersebut, pelajar dapat mengerti secara langsung tata cara aksi yang benar sehingga para pelajar yang turun ke jalan bersama IPM adalah pelajar yang telah teredukasi. Bukan hanya di sekolah, perguruan tinggi Muhammadiyah juga ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan politik baik melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun dengan bermitra bersama lembaga yang menangani isu politik dan pemilu. Mahasiswa tingkat awal merupakan kelompok pemilih pemula juga, sehingga perlu diedukasi untuk meningkatkan kesadaran akan partisipasi politik. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai ortom yang ada di perguruan tinggi biasanya lebih aktif menyelenggarakan diskusi bertema politik dibanding IPM. Hal ini dikarenakan kehidupan mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan kehidupan politik dan dianggap lebih pantas membicarakan politik jika dibandingkan dengan pelajar.

Selain itu hubungan mitra yang terjalin antara sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah dengan lembaga-lembaga tersebut juga merupakan usaha untuk memperkuat nilai-nilai karakter

yang telah diajarkan pada mata pelajaran PPKn. Kegiatan-kegiatan di luar kelas ini menambah pengetahuan dan pemahaman pelajar atau mahasiswa untuk berdemokrasi, salah satunya dengan berpartisipasi aktif dalam pemilu. Sosialisasi pemilu juga menjelaskan tata cara menjadi pemilih yang cerdas, sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat mengetahui, mengenali calon yang akan dipilih dengan menggali berbagai literatur yang dapat dipercaya, sehingga para pemilih pemula terhindar dari hoax. Usaha ini juga dilakukan untuk memperkuat kesadaran dari pemilih pemula bahwa menyalurkan suaranya melalui pemilu adalah hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara yang baik. Tumbuhnya kesadaran akan berdemokrasi akan menghindarkan pemilih pemula dari money politic, karena pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilu bukan karena dibayar tetapi karena sadar bahwa suaranya penting untuk masa depan bangsa Indonesia.

Kemudian pendidikan politik bagi pemilih pemula yang dilakukan di luar sekolah oleh Muhammadiyah lebih banyak dilakukan kepada anggota dan kader Muhammadiyah. Organisasi otonom Muhammadiyah yang beranggotakan pelajar, pemuda dan pemudi, seperti Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul 'Aisyiah aktif melakukan pendidikan politik atau kegiatan semacamnya yang meningkatkan kualitas anggota dan kader. Kegiatan peningkatan kualitas anggota dan kader ini penting dilakukan Muhammadiyah mengingat bahwa Muhammadiyah memiliki banyak anggota dan kader yang tersebar di seluruh Indonesia. Masyarakat juga mengenal kader Muhammadiyah sebagai santri terpelajar yang berpikiran modern. Oleh sebab itu, untuk menjaga citra baik yang telah tersemat, maka perlu bagi Muhammadiyah terus memperbarui semangat kader Muhammadiyah agar dakwahnya tetap dapat mengikuti perkembangan zaman.

Nasyiatul 'Aisyiah dan 'Aisyiah sebagai organisasi keperempuanan di Muhammadiyah juga turut andil dalam pendidikan politik di kalangan perempuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Muhammadiyah. Wujud kegiatan dapat berupa kegiatan yang bersangkutan langsung dengan pemilu, maupun sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kegiatan yang bersangkutan langsung dengan pemilu misalnya, pembekalan pemantau pemilu bagi Nasyiatul 'Aisyiah atau 'Aisyiah. Pembekalan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kader tentang instrumen dan teknis pemantauan pemilu, juga peningkatan pemahaman tentang demokrasi dan pemilu.

Sama halnya dengan NA, Pemuda Muhammadiyah tak ketinggalan memberi pendidikan politik bagi anggota dan kadernya, mengingat bahwa anggota Pemuda Muhammadiyah keseluruhannya adalah laki-laki yang identik menjadi pemimpin. Pendidikan politik di Pemuda Muhammadiyah juga dilakukan dengan kerja sama dengan pihak-pihak yang peduli dengan isu-isu politik maupun lembaga-lembaga yang berhubungan dengan politik dan/atau pemilu. Misalnya yang dilakukan oleh Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada saat Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan pada saat Pandemi Covid-19, mendorong agar kader Pemuda terlibat aktif dalam memastikan gelaran Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan dan terpenuhinya asas *luber jurdil* (pemudamuhammadiyah.org). Program-program seperti pelatihan, seminar, diskusi terbuka, atau semacam sekolah demokrasi dan politik dilakukan untuk tujuan jangka panjang, yaitu mempersiapkan kader Pemuda Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah, kader umat dan kader bangsa, sehingga generasi Muhammadiyah tidak hanya terjebak pada Amal Usaha yang sudah ada, tetapi menciptakan peluang agar lebih bisa bermanfaat kepada persoalan yang lebih luas lagi (suaramuhammadiyah.id).

Kampanye-kampanye secara lisan di lingkungan internal ortom juga dilakukan, misalnya dengan himbauan untuk menghindari money politic, menghindari tekanan, memilih dengan cermat dan memilih sesuai hati nurani setiap menjelang penyelenggaraan pemilu. NA dan Pemuda Muhammadiyah juga dibebaskan untuk aktif di lembaga independen pemilu sebagai wujud lain dari partisipasi politik. Meskipun aktif di lembaga-lembaga independen pemilu, tidak diperkenankan

mereka membawa nama organisasi Muhammadiyah. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi anggota Bawaslu dan KPU. Independensi anggota Bawaslu dan KPU ini perlu dijaga untuk menghindari konflik kepentingan. Muhammadiyah juga melarang Pimpinan Pusat hingga Ranting memiliki dua jabatan bersamaan, terutama pada jabatan Pengurus Harian. Melalui ortom-ortom inilah nilai-nilai keislaman di internalisasi dalam setiap tindakan, terutama ketika keluar dan menjadi kader bangsa.

Kader bangsa harus mengutamakan kepentingan umat dan memegang teguh semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran. Bahwa setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil yang akan menghancurkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum merupakan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dalam kehidupan profesi. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) ini merupakan salah satu ideologi Muhammadiyah yang menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pedoman Hidup Islami ini tentunya berdasar pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mencerminkan kepribadian islami menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. PHIWM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengamanatkan kepada warga Muhammadiyah untuk tidak apatis dan mengambil langkah aktif melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah serta menghindari kemunkaran.

Berangkat dari amanat PHIWM tersebut, kader Muhammadiyah tidak sedikit yang terjun ke kehidupan politik praktis sebagai wujud kontribusi kader Muhammadiyah sebagai kader bangsa. Namun, tetap perlu ditegaskan bahwa Muhammadiyah secara organisatoris bukanlah organisasi politik dan tidak memiliki hubungan dengan partai politik manapun. Kader Muhammadiyah yang telah siap menjadi kader bangsa tidak diperkenankan membawa nama organisasi Muhammadiyah selama menjabat. Komitmen tersebut dilakukan untuk menghindarkan adanya konflik kepentingan, baik di tubuh organisasi Muhammadiyah maupun dalam pemerintahan. Namun, selama menjalankan jabatannya di pemerintah, kader Muhammadiyah harus selalu memegang teguh semangat ideologi Muhammadiyah untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan.

Simpulan

Pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh Muhammadiyah dalam rangka menyiapkan civil society dilakukan melalui dua saluran, yaitu melalui sekolah dan organisasi otonom kepemudaan dan keputrian. Pendidikan politik dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berupa seminar, diskusi terbuka, pelatihan, dan kampanye-kampanye di kalangan internal kader organisasi. Selain itu, pendidikan politik dilakukan pula dengan memberikan pengalaman langsung seperti menjadi pengawas pemilu sukarela dan turut aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah.

Referensi

- (2020). Pilkada Serentak, Cak Nanto Dorong Kader Aktif Kawal Pemilu. Diakses pada 21 Juni 2021 pukul 12.18 WIB melalui <https://pemudamuhammadiyah.org/pilkada-serentak-cak-nanto-dorong-kader-aktif-kawal-pemilu/>.
- Agus. (2017). Siapkan Kader di Pemerintahan, Pemuda Muhammadiyah Ponorogo Adakan Sekolah Politik. Diakses pada 5 Juni 2021 pukul 08.43 WIB melalui <https://suaramuhammadiyah.id/2017/05/31/siapkan-kader-di-pemerintahan-pemuda-muhammadiyah-ponorogo-adakan-sekolah-politik/>.
- Arif, D.B. (2018). Negara Pancasila: Negara Perjanjian dan Persaksian. Disampaikan pada Sosialisasi Empat Pilar MPR, diselenggarakan atas kerja sama Ikatan Alumni PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Sabtu, 8 September 2018 di Auditorium Kampus II UAD.

- Halili. (2006). Masa Depan Civil Society di Indonesia: Prospek dan Tantangan. *Jurnal Civics*, Vol. 3, 92-106.
- Halking. (2016). Simulasi Praktik Model Pendidikan Politik Sebagai Salah Satu Formatif Mata Kuliah Pendidikan Politik di Jurusan PPKN FIS UNIMED. Makalah ini disajikan dalam Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-I, di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Harnom, F., dkk. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Milenial dalam Memahami Bahaya Vote Broker oleh KPU. [Versi Elektronik]. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 6, 1-10.
- Hazmi, M., dkk. (2020). Ideologi Muhammadiyah. Karawang: PT. Jamus Baladewa Nusantara.
- Hermawan, I.C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)* Vol. 10 no 1 Edisi Maret 2020 ISSN 2087-5185 E-ISSN : 2622-8718.
- Kusuma, IGW., dkk. (2020). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol. 1: 164-169.
- Kuswandro, W.E. (2016). Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik. Makalah ini disajikan dalam Seminar Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Guna Menciptakan Kepemimpinan Yang Berkebangsaan, di Probolinggo.
- Martini, E. dan Febri S.P. (2018). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula di SMK PGRI 1 Cimahi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 2: 270-283.
- Nashir, H. (2016). Muhammadiyah Abad Kedua. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. [Versi Elektronik]. Solo: Cakra Books.
- Prayoga, Dimas. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Kota Pontianak). [Versi Elektronik]. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol 1, 1-96.
- Saputro, Y.D. (2015). Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Generasi Muda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009 - 2014). *Jurnal Ketahanan Nasional*, XXI (1), April 2015: 34-42.



LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula oleh Muhammadiyah dalam Rangka Menyiapkan *Civil Society*
Nama : Syifa Alkautsar
NIM : 17401241038
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 22 Juli 2021
Pembimbing,

Reviewer,

Chandra Dewi Puspitasari, SH., LL.M.
NIP. 19800702 200501 2 002

Dr. Suharno, M.Si.
NIP. 19680417 200003 1 001